

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ekonomi dan cepatnya inovasi berkembang membuat setiap perusahaan harus mampu memiliki daya saingnya. Perusahaan dibentuk dengan tujuan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, oleh karena itu diperlukan beberapa aspek untuk mencapai tujuan ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti modal yang diinvestasikan untuk berbagai kegiatan operasional dan keuangan perusahaan, baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman yang diperoleh dari utang kepada kreditur dan pelepasan saham di bursa. Modal ini disebut Biaya Modal atau *Cost of Capital*.

Cost of Capital sendiri secara luas didefinisikan sebagai harapan pemegang saham untuk pengembalian modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Dengan kata lain, *Cost of Capital* adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk modal yang diinvestasikan oleh investor (Liberty &Asyraf, 2021). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya biaya modal. Biaya modal yang terdapat pada satu perusahaan akan mungkin berbeda dengan perusahaan yang lain dan akan bervariasi dengan berjalannya waktu. Semakin rendah biaya modal yang dikeluarkan perusahaan maka akan semakin berkurang pula biaya beban yang harus dibayarkan kepada penyedia dana perusahaan. Biaya modal juga bergerak sesuai dengan risiko yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan. Investor akan membutuhkan tingkat pengembalian yang diharapkan saat menginvestasikan modal mereka. Tingkat pengembalian adalah biaya peluang investor untuk melakukan investasi, yaitu setelah investasi dilakukan, investor harus melupakan pengembalian yang ditawarkan oleh investor lain. *Return* yang hilang kemudian menjadi *opportunity cost* investasi, dan *opportunity cost* ini kemudian menjadi tingkat pengembalian yang diminta oleh investor. Untuk itu para investor sekarang mulai gencar mencari

peluang investasi di beberapawilayah negara. Salah satu wilayah yang dicari para investor untuk melakukan yaitu pada wilayah ASEAN. ASEAN telah menjadi target investasi asing langsung yang menarik tidak hanya karena ukuran pasar dan kekayaan sumber daya alamnya tetapi juga karena lingkungan ekonominya yang stabil. (Pusparida, 2016). Negara ASEAN karena sebagaimana yang diketahui, sejak krisis ekonomi 2008, pusat kekuatan ekonomi dunia secara perlahan bergeser dari Negara-negara barat yaitu Eropa dan Amerika Utara, menjadi ke Asia. Di Asia sendiri, salah satu zona perekonomian yang berkembang pesat adalah ASEAN (Murhadi, 2017).

Menurut Menteri Perindustrian terdapat dua kendala utama pada perusahaan yang terjadi akibat pandemic *Covid-19*, salah satunya pada sektor manufaktur yaitu kendala cash flow serta kebutuhan akan modal kerja. Dua hal tersebut dibutuhkan untuk restarting industri ketika kondisi kembali normal dan bisa beraktivitas seperti semula. Sehingga diperlukan upaya untuk kembali mendorong investasi (Hartomo, 2020). Masalah tersebut dapat menjadi alasan pentingnya *Cost of Capital* dalam perusahaan dikarenakan perusahaan harus tetap mempertahankan keberlanjutan kegiatannya agar tetap stabil. *Cost of Capital* sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Factor-faktor tersebut diantaranya, Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, Profitabilitas dan ukuran perusahaan (Mulyati, 2018; Pratama & Rifa, 2019; Septiani & Taqwa, 2019), lalu terdapat *Corporate Tax Planning and avoidance* (Chun et al., 2019; Goh et al., 2016; Purwaka et al., 2022), dan *Ownership Structure* (Ellili, 2020), serta terdapat sebuah factor yang juga dapat mempengaruhi *Cost of Capital* perusahaan yaitu *Environment, Social, Governance* atau biasa disingkat sebagai ESG (Atan et al., 2017; Ellili, 2020; Johnson, 2020).

Untuk itu agar perusahaan dan investor tetap mendapatkan profit dari kegiatannya munculah konsep *Sustainability* atau berkelanjutan. Di mana perusahaan akan tetap mendapatkan keuntungan dari kegiatan perusahaannya dengan cara perusahaan harus tetap bertahan, berkembang, dan terus mengikuti perubahan zaman (Thomas et al., 2018). Hal itu terlihat dari beberapa dekade terakhir, perusahaan telah menerima peningkatan permintaan dari *Stakeholders* atau

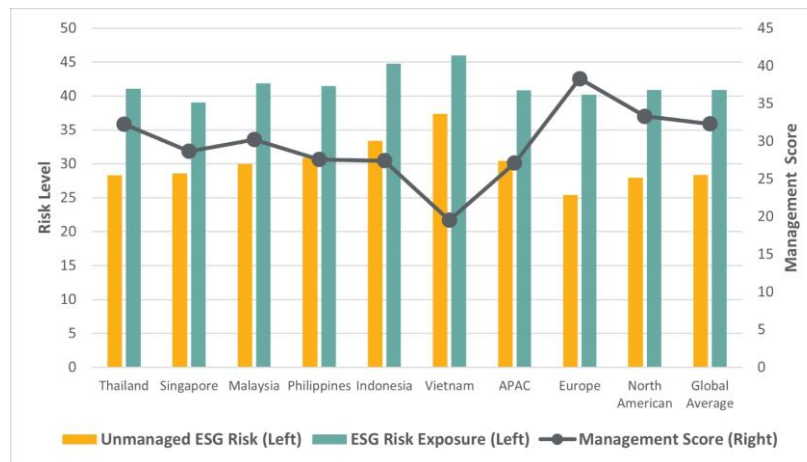
pemangku kepentingan untuk menerapkan kegiatan keberlanjutan kepada perusahaan mereka, agar perusahaan tersebut tetap memunculkan profit. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada forum G20 yang dilaksanakan di Bali, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya bahwa forum tersebut dapat digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) (Medianti, 2022). Urgensi dari percepatan ini didasari oleh meningkatnya kemiskinan yang ekstrim akibat pandemi, serta terganggunya stabilitas bahan kebutuhan dasar maupun industri khususnya di negara-negara berkembang (Medianti, 2022). Berlanjut dari permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian SDGs dan upaya kebangkitan ekonomi, salah satunya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada satu sudut pandang saja, tetapi pada semua aspek dari hulu hingga hilir yang terkena dampak pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat sekitar. Konsep tersebut juga terkait dengan sistem infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan lain-lain, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, aspek infrastruktur ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan tidak lagi terabaikan.

Menurut Raimo et al (2021), para *Shareholder* mulai lebih fokus pada perilaku berkelanjutan perusahaan dengan mengevaluasi pengungkapan perusahaan tentang bagaimana mereka mengelola masalah lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (ESG). Ini menunjukkan bahwa saat ini, investor mulai memperhitungkan bahwa informasi non-keuangan sama pentingnya dengan data keuangan bagi mereka untuk membuat keputusan investasi. Bagi perusahaan, memenuhi harapan *shareholder* menjadi salah satu tujuan utamanya (Nass, 2021). Cara untuk mencapai harapan *Shareholder* mereka adalah dengan memaksimalkan nilai perusahaan dan ini termasuk pelaksanaan kegiatan *Environment, Social,*

Governance atau biasa disebut ESG dalam pembangunan berkelanjutan (Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan). Pelaksanaan kegiatan ESG dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hazan Fauwzi juga mengatakan bahwa keuntungan lain untuk menerapkan ESG adalah perusahaan akan lebih menarik bagi investor. Investasi ESG beralih dari sebelumnya hanya pada pasar tertentu menjadi umum. Permintaan akan investasi ESG semakin meningkat secara global, termasuk Asia, khususnya pasar ASEAN. Secara khusus, ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam) mulai menunjukkan tren pada investasi ESG, sedangkan negara-negara anggota lainnya belum menunjukkan tren serupa (Korwatanasakul & Majae, 2019).

Menurut *Asean Statistical Yearbook* yang mana merupakan sebuah divisi yang menyediakan data statistika dari negara-negara ASEAN atas beberapa sector seperti ekonomi, pariwisata, populasi, kesehatan, dan perdagangan. *Asean Statistical Yearbook* mengatakan bahwa terdapat 10 komoditas yang paling banyak menyumbangkan hasil eksportnya bagi ASEAN, dari 10 komoditas tersebut terdapat 3 komoditas teratas dalam tahun 2013-2018 yaitu *mineral fuels*, *mineral oils* dan *product distillation*. Komoditas tersebut merupakan bahan dasar fosil yang merupakan minyak bumi, gas alam, dan batubara (Hutajulu, 2020). Sehingga banyak para investor yang melirik ASEAN untuk menanamkan investasinya.

Negara ASEAN yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memiliki potensi yang menjanjikan dalam hal investasi. Menurut *World Economic Outlook* bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kawasan ASEAN diprediksi akan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang hanya menunjukkan angka 4,7%. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di ASEAN, tetapi masih menghadirkan risiko dan ketidakpastian dalam prospek pertumbuhannya. Dalam hal ini dapat dilihat dari perusahaan di negara ASEAN yang melaporkan ESG perusahaannya (Pan, 2021).



Sumber : Pan (2021)

Gambar 1. 1 ESG Performance Comparison

Menurut data pada gambar 1.1 terdapat 6 negara di ASEAN yang menunjukkan bahwa negara Thailand memimpin dalam hal kinerja ESG dibandingkan dengan lima negara lainnya. Menurut Chairani & Siregar (2021) karena pemerintah saat ini mencari cara yang efektif untuk memimpin negara mereka keluar dari krisis terkait ini, sementara juga mempertimbangkan batas-batas planet ini, ekonomi hijau telah diusulkan sebagai cara untuk mendorong kebijakan nasional baru dan kerja sama internasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Hijau memiliki tujuan untuk mendorong kebijakan public guna menciptakan system perekonomian hijau yang nantinya akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (IESR, 2021). Melalui aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG).

Namun, terlepas dari kebaikan ESG, ada juga kesenjangan antara aspirasi dan tindakan di antara investor dan konsumen. Mengenai ESG, ada argumen bahwa investasi ESG dianggap “costly”. Pernyataan terkait ESG mahal, juga didukung oleh salah satu artikel oleh Stackpole (2021), dikatakan bahwa meskipun ada banyak perusahaan yang memiliki banyak ide tentang bagaimana memberikan akses yang adil untuk produk, mempertahankan untuk mengurangi limbah dan bersedia membuat komitmen untuk meningkatkan keberlanjutan, tetapi banyak dari mereka masih tersandung oleh implikasi keuangan. Alasan mereka menahan diri

Tasya Agnestriana, 2022

PENGARUH ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE TERHADAP COST OF CAPITAL PADA PERUSAHAAN DI ASEAN PERIODE 2018-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository@upi.edu | perpustakaan@upi.edu

dalam menerapkan ide-ide dan komitmen tersebut adalah karena anggapan bahwa inisiatif keberlanjutan selalu mengarah pada biaya yang lebih tinggi, pajak yang lebih tinggi, defisit fiskal yang lebih tinggi, dan, pada akhirnya, harga yang lebih tinggi (Marco. B, John. P, Amadeus. P, Jean. M.I (2021). Adapun para investor, dikarenakan adanya pengambilan keputusan yang skeptis di kalangan investor dalam investasi, aliran dana besar-besaran ke investasi ESG mungkin telah memfokuskan perhatian mereka pada risiko dan pengembalian untuk investasi keberlanjutan tersebut dari perusahaan (Nass, 2021). Investasi keberlanjutan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang merugikan karena ESG atau investasi keberlanjutan belum menjadi arus utama di kalangan investor dan praktisi berdasarkan oleh beberapa peneliti (Chams & Garc, 2021; Cornell, 2020; Eccles et al., 2019)

Selain itu, menurut ASEAN Japan-Centre perusahaan-perusahaan di ASEAN belum sepenuhnya mengintegrasikan investasi ESG di dalam strategi bisnis inti mereka. Hal ini diakibatkan sejumlah faktor seperti, persepsi keliru seputar investasi ESG, keterbatasan kemampuan untuk sepenuhnya mengintegrasikan ESG, serta panduan dan dukungan yang kurang memadai dari pemerintah dan industri. Lalu, masih terdapat kesenjangan antara investasi ESG dan keberhasilan SDGs pada wilayah ASEAN.

Sementara, ASEAN merupakan wilayah di bagian Asia yang mana merupakan wilayah dengan sumber mineral yang melimpah. Industri manufaktur di Asia memainkan peran besar dalam sumber mineral dunia untuk produksi. Dalam penelitian oleh Thin (2017) dikatakan bahwa suhu rata-rata di kawasan Asia-Pasifik telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan selama 40 tahun terakhir dan diperkirakan akan meningkat sebesar 6 derajat Celcius pada akhir abad ini menurut perkiraan terbaru dari Asian Development Bank (ADB) dan Potsdam Climate Research Institute for Impact Studies. Dengan meningkatnya suhu, peningkatan risiko banjir dari badai, dan hujan lebat, akan ada efek buruk yang luas pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut (Prakash, 2018). Artikel lain oleh Kaye (2016) menyatakan bahwa salah satu masalah serius

Tasya Agnestriana, 2022

PENGARUH ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE TERHADAP COST OF CAPITAL PADA PERUSAHAAN DI ASEAN PERIODE 2018-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository@upi.edu | perpustakaan@upi.edu

yang terjadi di Indonesia adalah degradasi lingkungan dan polusi yang disebabkan oleh operasi pengerukan material. Perkembangan sektor dunia usaha yang telah sampai pada tahapan global, menyebabkan banyak lahan terbuka yang semakin meluas dan dapat mempengaruhi aspek lingkungan. Sehingga, menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya terhadap lingkungan sosial. Pembangunan infrastruktur yang menghasilkan emisi karbon tinggi, seperti di sektor energi dan manufaktur yang menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas wajar. Emisi karbon, salah satu jenis emisi gas rumah kaca, merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran udara, yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Tingkat emisi karbon yang tinggi diketahui mempengaruhi peningkatan suhu permukaan bumi, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan kondisi iklim, meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Contoh lain, pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat sekitar, misalnya. Hal ini mempengaruhi hubungan antara infrastruktur dan masyarakat. Oleh karena itu, dari konsep keberlanjutan, kondisi tersebut tidak optimal baik bagi pemilik infrastruktur maupun masyarakat (Medianti, 2022).

Secara keseluruhan, laporan Komisi Hak Asasi Manusia 2016 menemukan bahwa perusahaan berada di peringkat kedua dalam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Perusahaan telah melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dalam 1.030 kasus, yang sebagian besar telah dituduh pelanggaran yang berasal dari konflik tanah dan masalah perburuhan. Pada tahun 2018, jumlah pelapor terhadap bisnis turun sedikit menjadi 973, tetapi pelanggaran hak asasi manusia tetap ada. Konflik lahan tetap menjadi penyebab utama pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan (ICEL, 2018). Degradasi dan pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius bagi operasi pertambangan di Indonesia. Operasi penambangan dan peleburan nikel di Sulawesi Tenggara telah mencemari wilayah pesisir Hakatutubu (Kaye, 2016). Demikian pula, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan 47 pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan dalam operasi penambangan emas yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia di Papua.

Tasya Agnestriana, 2022

PENGARUH ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE TERHADAP COST OF CAPITAL PADA PERUSAHAAN DI ASEAN PERIODE 2018-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository@upi.edu | perpustakaan@upi.edu

Temuan termasuk hilangnya ruang hutan, hilangnya keanekaragaman hayati atau polusi yang melebihi standar pemerintah (TEMPO, 2018)

Tidak hanya proses pengerukan material yang menyebabkan masalah bagi lingkungan, hasil dari *The World Counts* menunjukkan bahwa diperkirakan ada lebih dari 15.000 penambang yang terbunuh setiap tahun. Ini berarti bahwa sektor pertambangan juga mempengaruhi sektor sosial di ESG. Sebuah studi dari salah satu negara di Asia, yaitu Indonesia, menyatakan bahwa banyak masyarakat di Indonesia telah menolak perusahaan pertambangan untuk beroperasi karena masalah kematian yang disebabkan oleh operasi pertambangan, dampak negatif terhadap kondisi kehidupan orang-orang yang tidak mampu, serta degradasi lingkungan (Kholis et al., 2020).

Berdasarkan paparan mengenai sosial yang dijelaskan di atas dapat diperlukan juga *Good Governance* yang baik. Secara sederhananya *Good Corporate Governance* merupakan sebuah bentuk tanggung jawab antara perusahaan dengan badan hukum, direksi, dan juga komisaris guna sebagai jembatan dengan pemegang saham. Dalam hal ini investor dapat melihat bagaimana perusahaan bertindak atas dampak yang ditimbulkan oleh proses kegiatan perusahaan. Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan, sehingga perusahaan perlu memberikan effort yang lebih untuk menstabilkan *Environment, Social, and Governance* mereka. Apakah lebih banyak pengeluaran sehingga akan mempengaruhi *Cost of Capital* perusahaan.

Dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, menunjukkan dengan jelas potensi kerusakan rumah, kehilangan usaha, dan masalah terhadap kesejahteraan masyarakat serta alasan utama di balik permintaan para *Stakeholder* dan pemegang saham untuk pengungkapan ESG untuk alasan transparansi keberlanjutan bisnis perusahaan, terutama di kawasan ASEAN. Serta karena tuntutan transparansi perusahaan untuk lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan terus meningkat, banyak perusahaan mulai menerapkan ESG dan mengungkapkannya untuk memenuhi harapan *Stakeholder* mereka serta pemegang saham mereka. Meskipun

negara-negara barat memimpin pengungkapan kegiatan ESG, kawasan ASEAN juga telah memulai keprihatinan mereka terhadap pelaporan ESG. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahman et al., (2021) menjelaskan bahwa beberapa perusahaan yang berlokasi di ASEAN telah mengungkapkan praktik ESG mereka untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan juga dapat mencari cara untuk meningkatkan pelaporan ESG mereka untuk bersaing di pasar internasional. Beberapa *Stakeholder* dapat memberi tekanan lebih pada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang ESG dan bagi pembuat kebijakan untuk merancang kerangka hukum tentang ESG agar sesuai dengan perusahaan ASEAN dan ini juga mempengaruhi proses bisnis perusahaan, terutama di bidang pertambangan, di mana perusahaan pertambangan melakukan kegiatan bisnis mereka secara langsung dengan alam.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait pengaruh ESG terhadap *Cost of Capital*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Atan et al., (2017). Penelitian tersebut mengambil data dari perusahaan *non-financial* di Malaysia, dengan memiliki tiga kriteria pengukuran yaitu profitabilitas, firm value, dan *Cost of Capital*. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa skor gabungan ESG secara positif dan signifikan mempengaruhi *Cost of Capital* atau biaya modal (WACC) perusahaan, tetapi secara individual, tidak ada faktor ESG yang signifikan dalam mempengaruhi WACC. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa para *stakeholder* belum memiliki kepercayaan lebih pada inisiatif ESG perusahaan yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya modal mereka. Lalu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Ellili (2020) dari penelitian tersebut terdapat hasil bahwa pengungkapan non-keuangan mengurangi *Cost of Capital* secara keseluruhan serta *Cost of Equity* dan *Cost of Debt*, secara terpisah. Kepatuhan perusahaan dengan praktik terbaik pengungkapan ESG dan pertimbangan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam laporan tahunan menunjukkan jaminan perusahaan dalam meningkatkan transparansi mereka, mengurangi asimetri informasi, serta mengurangi *Cost of Capital* mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa pemegang saham dan kreditor tidak hanya peduli dengan

laporan keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan termasuk masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Hal itu sejalan dengan penelitian dari Johnson (2020) yang mengatakan bahwa ESG mempengaruhi *Cost of Capital* perusahaan. Dikatakan lagi bahwa mengingat bahwa semakin banyak penyedia utang dan ekuitas sedang mempertimbangkan praktik dan pengungkapan ESG perusahaan, itu dapat menawarkan perusahaan kesempatan untuk meningkatkan sumber modal tambahan. Sementara itu, terdapat juga penelitian yang mengatakan bahwa *Cost of Capital* tidak berpengaruh atau bukan termasuk saluran dalam kegiatan ESG. Dari hasil penelitian tersebut terdapat inkonsistensi dari riset sebelumnya serta masih jarangya penelitian yang menggunakan perusahaan dengan sektor *basic material*.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, studi ini bertujuan untuk melakukan penelitian pada efek penerapan ESG terhadap *Cost of Capital* perusahaan yang bergerak di bidang *basic material* dan tercatat di *Thomson Reuters database*. *Cost of Capital* dapat dilihat melalui *Cost of Equity* dan *Cost of Debt* sebuah perusahaan. Menurut Putra (2014), *Cost of Equity* diantaranya di pengaruhi oleh nilai pasar ekuitas dan sistematis. Nilai pasar ekuitas (*Market Value of Equity*) adalah nilai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan menurut penilaian pelaku pasar, dan kapitalisasi pasar ekuitas merupakan salah satu variabel yang menggambarkan ukuran suatu perusahaan. Semakin besar nilai pasar ekuitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut di mata pelaku pasar. Selain itu, *Cost of Debt* juga mempengaruhi biaya modal ekuitas. Dana pinjaman berkaitan erat dengan utang kepada perusahaan, dan kinerja perusahaan dapat dilihat dari sumber-sumber seperti jumlah utang kepada kreditur. Untuk melihat seberapa bergantung perusahaan pada utangnya, dapat melihat rasio keuangan, yang dikenal sebagai *Leverage*. Maka dari itu banyak dari investor melihat keberlanjutan perusahaannya dari pandangan *Cost of Capital*. Selain itu, terlihat bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan nilai sebuah perusahaan. namun, apakah benar jika ESG yang mempengaruhi nilai sebuah perusahaan atau

sebenarnya, penerapan ESG justru dipengaruhi oleh kemampuan keuangan perusahaan. Pengungkapan beberapa studi empiris sebelumnya masih belum meyakinkan dan terus memberikan inkonsistensi hasil. Selain itu, masih sedikitnya ada peneliti yang secara bersamaan meneliti tentang pengaruh ESG terhadap *Cost of Capital* di ASEAN. Beberapa studi empiris sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan di Amerika atau Eropa. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah menganalisis pengaruh ESG terhadap *Cost of capital* pada perusahaan di ASEAN yang mengungkapkan laporan ESG secara lengkap di *Thomson Reuters database*, dari sepuluh negara hanya empat negara yaitu hanya Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura. Perbedaan hasil antara studi empiris terkait sebelumnya serta belum dilakukannya penelitian tersebut diambil sebagai masalah utama dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum *ESG Disclosure* pada perusahaan di setiap negara ASEAN.
2. Bagaimana gambaran umum *Cost of Capital* pada perusahaan di setiap negara ASEAN.
3. Bagaimana pengaruh *ESG Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan di ASEAN.

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut merupakan tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum *ESG Disclosure* pada perusahaan di setiap negara ASEAN.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum *Cost of Capital* pada perusahaan di setiap negara ASEAN.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *ESG Disclosure* terhadap *Cost of Capital* pada perusahaan negara ASEAN.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori dan konsep mengenai pelaksanaan manajemen laba dan dapat menjadi acuan serta tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan *Environment, Social, Governance* terhadap *Cost of Capital* perusahaan.
2. Secara empiris, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menilai kegiatan manajemen laba pada perusahaan sehingga bisa menjadi referensi dalam membuat kebijakan-kebijakan bagi perusahaan. Bagi investor, diharapkan dapat membantu dalam melakukan pertimbangan dalam melakukan investasi kepada perusahaan. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu proses keberlanjutan perusahaan dengan menerapkan *Environment, Social, Governance* atau ESG. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai pelaksanaan manajemen laba perusahaan.